

Maret 2025



SPECIAL CONCERN

MEDIA BERITA DAN MEDIA SOSIAL

TOKENISASI SEBAGAI ALTERNATIF INVESTASI MASYARAKAT UNTUK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

This reproduced document is the property of GREAT Institute and may not be or distributed without prior written permission.

Maret 2025

LATAR BELAKANG

Pada tahun 2025, rasio utang pemerintah Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan akan berada di kisaran 38,4% hingga 40,7%. Defisit APBN sebesar Rp31,2T atau 2,53% dari PDB. Pada akhir September 2024 utang pemerintah telah mencapai Rp8.641T. Pemerintah berencana menambah utang lagi Rp775T pada tahun 2025.

Pada bulan Maret 2025, Fitch dan Moody's masih tetap memberikan peringkat investment grade kepada Indonesia namun memberikan peringatan terhadap pelemahan kekuatan fiskal Indonesia akibat penurunan penerimaan negara sementara pembayaran bunga hutang akan meningkat.

Kemudian Goldman Sachs memproyeksikan defisit APBN semakin melebar dan mendekati batasnya, yakni 2,9% pada 2025 dan menurunkan peringkat obligasi negara tenor 10 dan 20 tahun menjadi netral.

Hal tersebut menyebabkan perubahan persepsi investor asing terhadap pasar saham, pasar uang dan nilai tukar mata uang sehingga berakibat kenaikan yield surat utang negara dan potensi gangguan terhadap stabilitas sektor keuangan.

PERUMUSAN MASALAH

Pemerintah membutuhkan alternatif sumber pembiayaan baru untuk Pembangunan selain utang melalui surat berharga negara.

KONDISI SAAT INI

Produk Kementerian Keuangan Non Penerimaan Negara yaitu :

1. Surat Perbendaharaan Negara (SPN)/T-Bills dan Obligasi Negara berdasarkan UU Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
2. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

ALTERNATIF SOLUSI

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan penerbitan langsung token untuk meningkatkan partisipasi investasi masyarakat domestik dan luar negeri untuk pembangunan. Manfaat Tokenisasi sebagai berikut :

- 1.Meningkatkan partisipasi pembangunan masyarakat melalui investasi Token
- 2.Salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan yang baru non hutang
- 3.Menjaga defisit fiskal dan rasio hutang tetap sesuai UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 4.Menjaga stabilitas sektor keuangan melalui perbaikan posisi proyeksi rating Indonesia Proses Tokenisasi ini mirip dengan proses pembentukan SBSN atau Sukuk Negara yaitu Token (Real World Asset) membutuhkan underlying aset seperti Sukuk, beda dengan SPN atau Obligasi Negara yang bayar bunga dan pokoknya melalui APBN. Aset underlying yang digunakan adalah obyek pembiayaan dan/atau Barang Milik Negara yang memiliki nilai ekonomis.

Penerbitan SBSN bertujuan untuk mendapatkan dana dari masyarakat dan investor yang nantinya digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan negara. Return atau manfaat yang diterima oleh investor (pemilik) token berasal dari pendapatan obyek pembangunan yang dibiayai melalui tokenisasi atau pun hasil sewa (manfaat guna) dari pemanfaatan Barang Milik Negara yang bernilai ekonomis yang menjadi underlying asetnya.

SARAN

Pemerintah dan DPR melakukan penambahan pasal tertentu dalam rangka penerbitan tokenisasi oleh Kementerian Keuangan (atau pun Danantara) pada revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang sedang direncanakan (<https://www.cnbcindonesia.com/market/20250321112631-17-620567/ketua-komisi-xi-dpr-revisi-uu-p2sk-untuk-perkuat-peran-bi>).